



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MAKMUN**
2. Jabatan : **SEKRETARIS DIREKTUR JENDERAL**
3. NHK : **798679**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 2.015.500.000

1. Tanah Seluas 160 m2 di KAB / KOTA BIMA, WARISAN Rp. 50.000.000
2. Tanah Seluas 1422 m2 di KAB / KOTA BIMA, WARISAN Rp. 75.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 252 m2/90 m2 di KAB / KOTA BIMA, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 225 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 92 m2/84 m2 di KAB / KOTA BIMA, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
6. Tanah Seluas 75 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 76.500.000
7. Tanah Seluas 75 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 76.500.000
8. Tanah Seluas 562 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 337.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. ---

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ---

D. SURAT BERHARGA

Rp. 35.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 191.061.860

F. HARTA LAINNYA

Rp. 120.000.000

Sub Total

Rp. 2.361.561.860



III. HUTANG

Rp.

664.323.567

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.697.238.293

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.